

Transfigurasi Konsep dan Implementasi dalam Pengembangan Keilmuan Seni Perguruan Tinggi di Kabupaten Tuban Menyongsong MBKM

Peluang Perguruan Tinggi Daerah Menyongsong

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kabupaten Tuban

Aulina Umazah, S.Pd., Tantra Sakre, S.Sn., M.Pd.

*Universitas Negeri Surabaya
umazahaulina@gmail.com
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya*

Abstrak

Pada awal tahun 2020 program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diakui atau tidak, program tersebut membawa harapan bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia, pun dengan berbagai tantangan yang dihadapi. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini membuka peluang bagi mahasiswa untuk melakukan penggalan kedalaman dan keluasan keilmuannya dengan melakukan pembelajaran di luar program studinya selama maksimal 3 semester. Kabupaten Tuban memiliki modal dasar potensial bagi pengembangan keilmuan seni dan budaya guna menyongsong program ini. Tuban berdiri di tengah-tengah industri raksasa nasional pun multinasional, latar belakang historikal berkesenian yang kuat, kearifan budaya lokal yang kental, kesemua hal ini dapat mendukung perguruan tinggi – perguruan tinggi di Kabupaten Tuban untuk membekali mahasiswanya dalam menyiapkan kompetensi mereka sesuai Capaian Pembelajaran Lulusan dan guna terjadinya *link and match* antara proses belajar dalam kelas dengan kebutuhan serapan di dunia kerja. Proses pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi literatur pada artikel terkait yang relevan dan wawancara dengan sivitas akademika (Universitas Ronggolawe dan beberapa pengguna lulusan atau *stakeholder*). Data – data yang terkumpul dianalisis kemudian dilakukan beberapa tahapan yaitu: penyajian data, intepretasi data, eksplanasi data, sebelum akhirnya dideskripsikan. Hasil penelitian berupa hipotesis yang mengungkapkan bahwa, kampus-kampus daerah, seperti di Tuban tidak perlu merasa minder dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta yang berada di kotamadya, karena program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini dapat membuka kesempatan asalkan perguruan tinggi daerah dapat membuka mata dan mencari celah dan peluang kerja sama dengan stakeholder – stakeholder di lingkungan masyarakat mereka.

Kata kunci: Merdeka Belajar Kampus Merdeka; Kabupaten Tuban; Keilmuan Seni

1. Pendahuluan

Permasalahan pendidikan di Indonesia dari tahun ke tahun selalu tidak dapat dituntaskan dengan satu langkah saja, berbagai macam kebijakan telah diambil oleh pemerintah tetap saja tidak menjadi solusi untuk menyelesaikan pendidikan di Negara multikultural dan dinamis ini, ditambah arus globalisasi yang semakin membuat pendidikan dijadikan sebagai kambing hitam atas segala permasalahan terkait sumber daya manusia yang tidak ada ujungnya. Perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Persoalan-persoalan pendidikan yang terjadi di Indonesia pada

umumnya merupakan permasalahan makro yang harus diselesaikan dari akar untuk dapat ditemukan solusi tepat antara pendidikan di satu daerah dengan daerah lain. Sebab hal tersebut tidak bisa disamaratakan. Ketimpangan pendidikan yang terjadi antara pendidikan tinggi di daerah dengan pendidikan tinggi di kotamadya menjadikan kebijakan pemerintah dianggap belum sesuai, hal tersebut bisa saja terjadi karena kurangnya pantauan lapangan, adanya ketimpangan aturan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, atau pihak yang menjadikan pendidikan sebagai proyek investasi maupun kepentingan politik. Sehingga dibutuhkan peran seluruh elemen masyarakat termasuk pemerintah pusat maupun daerah untuk dapat membantu pendidikan tinggi daerah agar

dapat menjadikan anak daerah mampu berkembang di daerahnya masing-masing demi menciptakan sumber daya manusia yang kompeten.

Mengenal Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, seperti yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, bahwa Kemerdekaan belajar adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Demikian ungkapan Mendikbud yang bisa dijadikan acuan dalam menanggapi problematika kampus-kampus daerah.

Kabupaten Tuban menjadi salah satu kabupaten dipantai utara yang memiliki kompleksitas potensi yang tidak diragukan lagi, puluhan perusahaan multinasional yang ada serta perguruan-perguruan tinggi Tuban harus dapat di sinkronkan. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka harus menjadi solusi atas ketimpangan pendidikan tinggi di Kabupaten Tuban.

Penulis tertarik dalam meneliti perkembangan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Kabupaten Tuban, karena penulis merasa bahwa penelitian ini akan menjadi bahan dasar dalam pengimplementasian Merdeka Belajar-Kampus merdeka.

Rumusan Masalah penelitian adalah bagaimana penerapan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Kabupaten Tuban. Tujuan Penelitian dibagi menjadi 2 yakni tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk menganalisis potensi Kabupaten Tuban dalam ranah pendidikan. Tujuan khusus untuk mendeskripsikan fungsi Merdeka-Belajar Kampus-Merdeka di kabupaten Tuban. Manfaat penelitian antara lain hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap akademisi terutama dari pendidikan yinggi daerah sehingga para akademisi beserta seluruh elemen perguruan tinggi mampu menerapkan MBKM didaerah masing-masing.

2. Metode

Metode penelitian Creswell (2015) dibagi dalam lima pendekatan, antara lain pendekatan naratif, fenomenologi, grounded

theory, etnografi, dan studi kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi (misalnya, pengamatan, wawancara, baham audiovisual, dan dokumen dan berbagai laporan), dan melaporkan deskripsi kasus atau tema kasus (2015: 135-136).

Peneliti memfokuskan pada isu atau persoalan, kemudian memilih satu kasus terbatas untuk mengilustrasikan persoalan. Dengan pendekatan kualitatif studi kasus diharapkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dipercaya dan bermanfaat.

3. Pembahasan Hasil

3.1. Mengenal MBKM

Hal yang paling kentara dan membutuhkan banyak pemikiran pada transfigurasi Kurikulum Kompetensi Negara Indonesia (KKNI) menjadi kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) adalah butir kebijakan yang berbunyi "Hak belajar tiga semester di luar program studi". Pernyataan di atas apabila dijabarkan lebih luas maka dapat diartikan sebagai berikut: Mahasiswa berhak memperoleh kesempatan belajar di luar program studi dalam kampus selama 1 semester (dengan ekuivalensi sebesar 20 sks) dan kesempatan belajar di luar kampus maksimal 2 semester (dengan ekuivalensi sebesar 40 sks)". Program studi harus melakukan bongkar pasang mata kuliah yang selama ini telah nyaman terpasang pada tiap semester untuk memberikan ruang sks bagi kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini.

Yang dimaksud dengan kesempatan belajar di luar program studi dalam kampus adalah mahasiswa dapat mengambil mata kuliah – mata kuliah yang ada pada program studi lain dengan catatan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut dapat memberikan kedalaman atau keluasan pada Capaian Pembelajaran Lulusan pada struktur kurikulum program studi mahasiswa yang bersangkutan. Program studi harus bekerja sama dengan prodi-prodi lain, duduk bersama, dan saling membuka diri dengan saling berbagi informasi berkenaan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan tiap prodi dan mata kuliah yang tersedia. Selain itu yang perlu dipersiapkan program studi adalah mata kuliah – mata kuliah pilihan yang dapat dipilih oleh program

studi lain pula. Program studi dapat menetapkan sebuah "paket mata kuliah" dengan pemateri/ dosen dari beberapa program studi yang berbeda. Sebagai ilustrasi, dapat dilihat tabel berikut:

Program Studi	Capaian Pembelajaran Lulusan	Kompetensi Tambahan	Prodi
Desain Produk	1. Mampu merancang produk 2. Mampu mengevaluasi obyek desain 3. Mampu menyusun dan menyampaikan solusi desain secara visual	Mampu menyusun, menganalisis dan menginterpretasi rencana keuangan	Akuntansi
		Mampu melaksanakan fungsi pemasaran	Manajemen
		Mampu merancang program dalam bidang periklanan	Komunikasi

Melalui kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini (hak belajar di luar prodi dalam PT yang sama) agaknya dibuat sejalan dengan kebijakan MBKM lainnya yaitu kemudahan bagi Perguruan Tinggi untuk membuka Prodi baru. Kampus-kampus di daerah yang hanya memiliki Prodi sedikit dan kadang tidak beririsan tampaknya 'dipaksa' untuk memperkaya pilihan Prodi yang dapat diambil mahasiswa.

Sedangkan realisasi dari butir "Mahasiswa berhak memperoleh kesempatan belajar di luar kampus maksimal 2 semester dengan ekuivalensi sebesar 40 SKS" inilah yang menjadi ciri khas pada Kurikulum MBKM ini. Ada 8 Bentuk Kegiatan Pembelajaran (merujuk pada Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1) yang dapat dipilih oleh Program Studi untuk disajikan kepada mahasiswa. Adapun delapan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) itu adalah sebagai berikut: 1). Pertukaran Pelajar, 2). Magang/Praktik Kerja, 3). Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, 4). Penelitian/ Riset, 5). Proyek Kemanusiaan, 6). Kegiatan Wirausaha, 7). Studi/ Proyek Independen, dan 8). Membangun Desa/ KKN Tematik. Beberapa BKP di atas dapat ditempuh atau digenapi dengan alternatif program lain yang telah ada sebelumnya oleh pemerintah. Sebut saja BKP Magang. Praktik Kerja dapat ditempuh apabila mahasiswa

memoleh Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Begitu pula dengan BKP Pertukaran Pelajar, dapat ditempuh dengan program lain yang serupa yaitu Program PERMATA SAKTI (Pertukaran Mahasiswa Nusantara Sistem Alih Kredit dan Teknologi Informasi).

Berdasarkan pengalaman penulis, dari kedelapan BKP ini yang menjadi lirikan atau primadona bagi Prodi adalah kedua bentuk BKP di atas; Pertukaran Pelajar dan Magang/ Praktik Kerja. Sebelum menyediakan opsi Pertukaran Pelajar antar PT tentu saja tiap Prodi ataupun PT harus melakukan kerja sama antar Institusi terlebih dahulu, dipayungi oleh MoU (*Memorandum of Understanding*) antar Perguruan Tinggi. Baru setelah itu pada unit pendidikan yang lebih kecil, biasanya Prodi atau Jurusan, merancang MoA (*Memorandum of Agreement*) atau PKS (Perjanjian Kerja Sama) yang disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak. Hal ini dapat menjadi sebuah pintu masuk bagi terjalannya bentuk-bentuk kerja sama lainnya di luar program Pertukaran Pelajar saja, misalkan kerja sama Mitra Bestari, Penelitian dosen bersama, pameran bersama, dan lain sebagainya. Seperti kata pepatah, sekali dayung dua tiga pulau terlampaui. Menjadi persoalan ketika perguruan tinggi – perguruan tinggi 'raksasa' sebut saja PTN-PTN pada tingkat Kotamadya hanya mau melakukan kerja sama dengan Prodi yang memiliki akreditasi sama atau lebih tinggi. Kondisi ini menyebabkan kampus-kampus daerah tidak berkesempatan melakukan alih transfer keilmuan dengan perguruan tinggi yang memiliki sumber daya lebih, dan ujung-ujungnya semakin melebarnya disparitas kualitas perguruan tinggi dalam negeri. PTN-PTN yang telah memiliki nama dan reputasi saat ini telah menjalin kerja sama antar mereka, solid, komprehensif, dan masif. Lalu bagaimana dengan nasib PTS-PTS yang berada di daerah?

Bentuk Kegiatan Pembelajaran lainnya yang menarik adalah Magang/ Praktik Kerja. Diharapkan program Magang/ Praktik Industri ini dapat memberikan pengalaman pembelajaran dunia kerja nyata (*experiential learning*) pada mahasiswa. BKP Magang adalah kunci untuk melakukan *link and match* antara perguruan tinggi sebagai kawah candradimuka pemroses mahasiswa sebelum akhirnya lulusan terjun ke lapangan kerja nyata dengan perusahaan/ industri tempat serapan lulusan perguruan tinggi. Dirasakan selama ini, magang yang berjangka pendek (kurang dari 6 bulan) dirasa

sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Perusahaan yang menerima mahasiswa magang juga berpendapat proses magang dalam waktu sangat pendek tidak bermanfaat, bahkan kerap mengganggu aktivitas di Industri.

Prodi harus berhati-hati pada penyeleksian mitra magang – mitra magang potensial yang akan digandeng untuk bekerja sama. Tidak jarang perusahaan yang diajak bekerja sama hanya melihat mahasiswa menjadi "tenaga karyawan gratisan" tanpa memperhatikan kebutuhan pengalaman belajar mereka. Dokumen MoA atau PKS harus benar-benar dirancang oleh kedua belah pihak secara terbuka dan demokratis agar tidak merugikan kedua belah pihak. Poin-poin krusial seperti jam kerja, pemberian *salary* atau *fee*, fasilitas yang diberikan oleh perusahaan, maupun ketersediaan tempat tinggal atau asrama bagi mahasiswa peserta magang harus disepakati di awal dan diperkuat dengan MoA atau PKS. Pemilihan perusahaan mitra magang pun harus sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan pada tiap prodi agar menunjang ketercapaian dari CPL prodi tersebut. Dari sudut pandang lain, program Magang/Praktik Kerja ini dapat menaikkan nilai keterserapan lulusan ketika kelak dilakukan *tracer study* alumni bagi akreditasi Prodi, karena yang sering terjadi di lapangan adalah mahasiswa yang sudah diterima magang dan *fit-in* di perusahaan tempat dia magang, setelah lulus, langsung ditarik menjadi pegawai tetap di sana.

Penyetaraan atau konversi satuan kredit yang diperoleh ketika mahasiswa memilih program Magang ini dapat ditentukan dengan 3 model: 1). *Free Form* atau Bentuk Bebas, 2). *Structured Form* atau Bentuk Terstruktur, dan 3). *Hybrid Form* atau Bentuk Campuran. Pada model Bentuk Bebas atau *Free Form*, 20 SKS yang diambil mahasiswa dikonversi dengan ketercapaian kompetensi yang didapat selama mengikuti program, baik kompetensi keras (*hard skills*) atau kompetensi halus (*soft skills*). Ilustrasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 01.

No.	<i>Hard skills</i> yang diharapkan	Bobot SKS
1.	Merumuskan permasalahan keteknikan	3 SKS
2.	Menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan	3 SKS
3.	Kemampuan sintesa dalam bentuk design	4 SKS

No.	<i>Soft skills</i> yang diharapkan	Bobot SKS
1.	Kemampuan berkomunikasi	2 SKS
2.	Kemampuan bekerjasama	2 SKS
3.	Kerja keras	2 SKS
4.	Kepemimpinan	2 SKS
5.	Kreativitas	2 SKS

Sedangkan pada Bentuk Terstruktur atau *Structured Form*, kedua puluh SKS tersebut dinyatakan nilai kesetaraannya dengan MK Prodi yang sejalan dengan lokasi magang. Ilustrasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 02.

No.	MK Penyetaraan	Bobot SKS
1	Fenomena transport	2 SKS
2	Unit operasi	3 SKS
3	Industri proses kimia	3 SKS
4	Rekayasa reaksi kimia	3 SKS
5	Kontrol Proses	3 SKS
6	Teknologi Separas	2 SKS
7	Laporan Akhir	4 SKS

Sedangkan pada bentuk Hybrid atau campuran, konversi ekuivalens mta kuliah ini mencampurkan *Free Form* dan *Structured Form*.

3.2. Titik balik Kabupaten Tuban

Kabupaten Tuban memiliki beberapa perguruan tinggi yang menjadi barometer terbentuknya Sumber Daya Manusia, antara lain;

- 1) Universitas Ronggowale
- 2) Universitas Sunan Bonang
- 3) Institut Agama Islam Nahdhatul Ulama
- 4) Stikes NU
- 5) Universitas Muhammadiyah

Perguruan tinggi yang notabene telah memiliki ribuan mahasiswa tersebut telah memiliki banyak mitra dalam pengembangan kemajuan SDM dengan para perusahaan-perusahaan multinasional Kabupaten Tuban. Berikut hasil akhir dari rekapan Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan tenaga Kerja Kabupaten Tuban

JUMLAH PERUSAHAAN TERDAFTAR :	845	
JUMLAH TENAGA KERJA TERDAFTAR	38529	
:		
JUMLAH PERUSAHAAN SKALA B :	54	
JUMLAH PERUSAHAAN SKALA M :	37	
JUMLAH PERUSAHAAN SKALA K :	709	
VERIFIKASI	291	
		MONEV 2017 : 30
		MONEV 2018 : 44
		MONEV 2019 : 62
		MONEV 2020 : 33
		WAJIB LAPOR : 122
BELUM TERVERIFIKASI :	554	

Melihat peluang sumberdaya manusia yang maju dan berkembang di kabupaten Tuban, Beberapa kampus telah memiliki program untuk turut serta dalam pengembangan SDM. Kampus Unirow merupakan kampus yang rutin mendapatkan kesempatan peluang beasiswa yang diberikan oleh Pertamina dalam bentuk jaminan uang kuliah gratis atau bahkan pendanaan riset dan pengabdian masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan tingkat kemiskinan Kabupaten Tuban yang masih bertengger lima besar di Jawa Timur (Banyuurip.com). Garis kemiskinan di Kabupaten Tuban pada 2018 mencapai angka 15,31 % atau 178.640 Jiwa. Angka tersebut didapat dari hasil survey dari sample di tiap-tiap kecamatan di Tuban. Oleh sebab itu ada banyaknya perusahaan nasional maupun multinasional dan perguruan tinggi di kabupaten Tuban harus menjadi langkah pemecahan masalah kemiskinan tersebut.

5. Kesimpulan

Bentuk implementasi MBKM terhadap kampus daerah di Kabupaten Tuban merupakan bentuk usaha pengentasan kemiskinan sekaligus pendongkrak perekonomian yang selama ini menjadi polemic ditengah masyarakat. Hal tersebut harus menjadi peluang perguruan tinggi dalam mengambil keputusan dalam mengadakan kerjasama antara PT dengan perusahaan.

Konsep merdeka belajar-Kampus merdeka pun juga harus disadari oleh seluruh elemen perusahaan untuk membuka diri

dalam mencari bibit sumber daya manusia di kabupaten Tuban terutama dengan menyeram mahasiswa-mahasiswa magang dari kampu-kampus di kabupaten Tuban. Sehingga adanya peraturan daerah juga harus di buat untuk dapat menyingkronkan dengan peraturan pemerintah pusat terkait system MBKM yang berlaku di daerah masing-masing terutama kabupaten Tuban.

Satuan penjaminan mutu di perguruan tinggi penyelenggara Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program "hak belajar tiga semester di luar program studi" wajib memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program magang industri. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan magang oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan judgment terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, program ini digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

4. Penghargaan

Penghargaan setingginya kami sampaikan pada Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban yang telah memberikan data perusahaan di kabupaten Tuban. Penghargaan kami juga kepada Rektor Universitas Ronggolawe yang berkenan menjadi narasumber serta memberikan argument terkait MBKM di kampus Universitas Ronggolawe Tuban.

5. Pustaka

- Arsip Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban. *Data Perusahaan Kabupaten Tuban* (2020)
- CRESWELL, John W. Desain penelitian. *Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif*, Jakarta: KIK, 2002.
- Effendi, S. (2003, January). *Pengelolaan Perguruan Tinggi Menghadapi Tantangan Global*.

In *Seminar Nasional Majelis Rektor
Indonesai* (pp. 1-12).

Hadi, S., Sujinah, M. P., Gufron, S., &
Yarno, M. P. (2016). *Prosiding Seminar
Nasional*.

INDRAJIT, Richardus Eko;
DJOKOPRANOTO,
Richardus. *Manajemen perguruan
tinggi modern*. Andi, 2006.

SIREGAR, Nurhayani; SAHIRAH,
Rafidatun; HARAHAHAP, Arsikal Amsal.
Konsep Kampus Merdeka Belajar di Era
Revolusi Industri 4.0. *Fitrah: Journal of
Islamic Education*, 2020, 1.1: 141-157.

TOHIR, Mohammad. *Buku Panduan
Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*.
2020.